BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak awal bulan Maret 2020 terjadi wabah penyakit Covid-19 (*corona virus disease*) yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini telah menginfeksi lebih dari 200.000 orang di 152 negara dalam waktu kurang dari tiga bulan. Penyebaran Covid-19 di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut terkena imbas Covid-19.

Langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah optimal, mulai dari penerbitan protokol kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, pengurangan waktu operasional, utilitas sebagian besar bandara, dan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan Perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 dalam Astuti (2021). Kemudian pemerintah mempertimbangkan bahwa Covid-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara. Penanganan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta

pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Dalam rangka penanganan Covid-19 ini, pada tanggal 16 April 2020 Menteri Sosial RI mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS). Masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah banyak sekali mengeluarkan dana untuk proses penanganan dan pengadaan pemulihan ekonomi. Dalam melakukan penanganan pandemi ini, pemerintah mengeluarkan penambahan dana APBN pada tahun 2020 sebagai bentuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Berdasarkan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi Covid-19 sangat besar, sehingga perlu diadakan pengawasan agar dalam pelaksanaannya digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 saja Rindorindo, (2021). Oleh karena itu, diharapkan para pejabat dalam melaksanakan wewenangnya mampu membuat kebijakan yang benar dalam melakukan proses penyaluran anggaran dana tersebut agar tidak menjadi sasaran penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi.

Namun pada kenyataannya, praktik korupsi oleh pejabat negara pada masa pandemi Covid-19 ternyata terjadi di Indonesia, padahal negara sedang dalam keadaan bencana nasional. Salah satu praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara di masa pandemi Covid-19 adalah korupsi oleh Sekda Samosir saat itu yakni Jabiat Sagala. Adapun kronologi kasusnya yaitu Pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah mengalokasikan dana Belanja Tak

Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana non-alam, termasuk pandemi tersebut. Kabupaten Samosir, sebagai bagian dari wilayah yang terdampak, menerima alokasi dana BTT yang bertujuan untuk mendukung berbagai upaya mitigasi dan penanggulangan dampak pandemi. Dana ini direncanakan untuk digunakan dalam pengadaan alat kesehatan, distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, serta untuk kebutuhan lain yang bersifat mendesak.

Drs. Jabiat Sagala, M.Hum, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Samosir, diberi tanggung jawab untuk mengelola dana BTT tersebut. Namun, bukannya menjalankan tugas dengan amanah dan sesuai ketentuan, Jabiat diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana tersebut. Penyalahgunaan ini termasuk tindakan penggelembungan harga (*mark-up*) dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan penanggulangan Covid-19 dalam Fransesco, 2021). Harga barang-barang yang dibeli melalui dana BTT dilaporkan jauh lebih tinggi dari harga pasar, yang mengindikasikan adanya upaya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dengan mengorbankan keuangan negara.

Selain penggelembungan harga, terdapat juga dugaan bahwa laporan penggunaan dana yang diajukan oleh BPBD Kabupaten Samosir telah dipalsukan untuk menutupi tindakan-tindakan melawan hukum tersebut. Dokumen-dokumen yang seharusnya menjadi alat pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik ternyata direkayasa agar terlihat sesuai dengan peraturan, padahal kenyataannya jauh dari itu.

Kasus ini mulai terungkap ketika masyarakat setempat mulai merasakan adanya ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial yang seharusnya didanai oleh BTT. Laporan dari masyarakat memicu investigasi oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian menemukan adanya penyimpangan yang signifikan dalam pengelolaan dana BTT di Kabupaten Samosir. Investigasi ini mengarah pada pengumpulan bukti-bukti yang memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi.

Setelah cukup bukti terkumpul, Drs. Jabiat Sagala ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kasusnya kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk proses penuntutan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Eddy Rifai, 2014). Dakwaan yang diajukan mencakup tuduhan penyalahgunaan wewenang, penggelembungan harga, dan pemalsuan dokumen dalam pengelolaan dana BTT.

Selama persidangan, sejumlah saksi dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat pemerintah, penerima bantuan, dan ahli keuangan, dihadirkan untuk memberikan keterangan. Para saksi ini memberikan kesaksian yang mengungkap lebih dalam tentang modus operandi penyalahgunaan dana BTT serta dampaknya terhadap masyarakat yang semestinya menerima manfaat dari dana tersebut. Para saksi juga memberikan penjelasan mengenai bagaimana harga barang-barang yang dibeli oleh BPBD Kabupaten Samosir ternyata sangat tidak wajar, dan jauh di atas harga pasar.

Di sisi lain, terdakwa Drs. Jabiat Sagala dalam pembelaannya berusaha menolak semua tuduhan yang diajukan. Ia menyatakan bahwa semua tindakannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Namun, bukti-bukti yang diajukan oleh JPU, termasuk dokumen-dokumen yang dipalsukan serta hasil audit yang menunjukkan kerugian negara, membantah klaim tersebut.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang, hakim akhirnya sampai pada putusan bahwa Drs. Jabiat Sagala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi. Dalam mempertimbangkan putusan ini, hakim melihat berbagai aspek, termasuk beratnya pelanggaran yang dilakukan, dampak negatif terhadap keuangan negara, dan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa telah merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pemerintah, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19 (Sesa et al., 2024).

Sebagai konsekuensi dari tindakannya, Drs. Jabiat Sagala dijatuhi hukuman pidana penjara, denda, serta diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dana tersebut. Selain itu, hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa larangan untuk menduduki jabatan publik di masa depan, sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindakan serupa.

Kronologi ini menunjukkan bagaimana proses hukum berjalan mulai dari awal penyelidikan, penuntutan, hingga putusan akhir di pengadilan. Kasus ini menjadi contoh nyata tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan dana publik, terutama dalam situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Drs. Jabiat Sagala, M.Hum, dalam kasus tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Samosir, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp229.832.800,00. Jumlah ini berasal dari berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan memanipulasi harga serta pemalsuan dokumen.

Diceritakan adanya korupsi berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di jabarkan di atas, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan penerapan hukum pada situasi darurat. Ketertarikan akan permasalahan ini menuangkan hasil penelitian dalam judul, **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Covid-19 Di Kabupaten Samosir (Studi Putusan No.28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur kewenangan dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Terkait dalam masalah ini, dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang akan dibahas sebagai yaitu:

1. Adanya penyalahgunaan jabatan dilakukan oleh Sekda Samosir
2. Manipulasi data dana belanja penanggulangan bencana Covid-19

3. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana belanja non-alam (Covid-19)

1.3. Batasan Masalah

Salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian adalah perlunya dibatasi permasalahan yang diteliti. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana belanja non-alam (Covid-19).

1.4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan rumusan formal yang operasional dari masalah yang akan diteliti dalam Arikunto (2009). Dari penjelasan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana belanja tak terduga penanggulangan bencana non-alam (Covid-19) dalam Kasus Perkara No.28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn?

1.5. Tujuan Penelitian

Maka tujuan dari penelitian ini secara garis besar yaitu untuk memahami secara mendalam pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana belanja tak terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana

non-alam (Covid-19) di Kabupaten Samosir, berdasarkan Kasus Perkara No.28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan bahan kepustakaan di bidang hukum pidana khususnya mengenai penyalahgunaan jabatan dalam tindak pidana korupsi yang dirasakan masih kurang, juga sebagai suatu sumbangan pengetahuan kepada kaum-kaum akademik yang membutuhkan pengetahuan mengenai permasalahan ini.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah tindak pidana korupsi, dan diharapkan dapat menanggulangi dan mencegah para pejabat dalam menggunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi.